

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Bidang kajian yang diambil peneliti ini adalah mengenai pengaruh kepemilikan institusi domestik, kepemilikan publik, *profitabilitas*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *risk management disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015.

Berdasarkan bidang kajian penelitian, penulis akan memaparkan mengenai manajemen, manajemen keuangan, bank, perbankan, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan publik, *profitabilitas*, *leverage*, ukuran perusahaan dan *risk management disclosure*.

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses dimana suatu perusahaan atau organisasi dalam melakukan sesuatu usaha harus mempunyai prinsip-prinsip manajemen dengan menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni, ataupun ilmu. Dikatakan proses karena manajemen terdapat beberapa tahapan untuk mencapai tujuan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dikatakan seni karena manajemen merupakan suatu cara atau alat

untuk seorang manajer dalam mencapai tujuan. Dimana penerapan dan penggunaannya tergantung pada masing-masing manajer yang sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi dan pembawaan manajer. Dikatakan ilmu karena manajemen dapat dipelajari dan dikaji kebenarannya (Athoillah, 2010).

G.R Terry (Hasibuan, 2010) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

John Kotter (2014:8) berpendapat bahwa *“Management is a set of processes that can keep a complicated system of people and technology running smoothly. The most important aspect of management include planning, budgeting, organizing, staffing, controlling, and problem solving”*. Artinya yaitu manajemen adalah serangkaian proses yang dapat membuat sistem teknologi yang rumit dari orang-orang dan berjalan dengan lancar. Aspek yang paling penting dari manajemen meliputi perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pegawai, pengendalian, dan pemecahan masalah.

Berdasarkan definisi-definisi para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen adalah sebuah ilmu dan seni yang digunakan disetiap organisasi yang didalamnya terdapat proses suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi secara efektif dan efisien yang dapat membantu perusahaan dalam mewujudkan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu bagian dari ilmu manajemen yang ditujukan terhadap kegiatan atau keputusan yang harus diambil dalam bidang keuangan yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham melalui meningkatnya nilai perusahaan.

Menurut Sudana (2011:1) manajemen keuangan adalah salah satu bidang manajemen fungsional perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang, keputusan pendanaan jangka panjang, dan pengelolaan modal kerja perusahaan meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek.

Sutrisno (2012) mendefinisikan manajemen keuangan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.

Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012 : 2) manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset yang didasari beberapa tujuan umum.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh aset dan dana untuk perusahaan, serta kemampuan perusahaan untuk mengelola dana dan aset tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien sehingga dapat mensejahterakan pemilik dari suatu perusahaan.

2.1.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan memiliki arti penting di semua jenis bisnis, termasuk perbankan dan institusi-institusi keuangan lainnya, sekaligus juga perusahaan-perusahaan industri dan ritel. Seiring dengan perkembangannya, manajemen keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan, dan mencari dana. Akan tetapi, manajemen keuangan juga mengatur penginvestasian dana, mengatur kombinasi dana yang optimal, serta mengatur pendistribusian keuntungan (pembagian dividen).

Menurut Fahmi (2013:4) tujuan dari manajemen keuangan, yaitu:

1. Memaksimumkan nilai perusahaan.
2. Menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang terkendali.
3. Memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang.

Menurut Martono dan Agus (2011:13) tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan (memaksimumkan kemakmuran pemegang saham) yang diukur dengan harga saham perusahaan. Tujuan Manajemen keuangan menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:4) adalah memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan yang ada saat ini.

Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian koefisienan keputusan keuangan. Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan atau memaksimumkan nilai perusahaan yang tercermin dari nilai sahamnya untuk meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan atau pemegang saham.

2.1.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan

Menurut Martono dan Agus (2011:4) ada 3 (tiga) fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu:

1. Keputusan Investasi (*Investment Decision*)

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi adalah yang paling penting diantara keputusan lainnya. Hal ini dikarenakan keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besarnya *rentabilitas* investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang.

2. Keputusan Pendanaan (*Financing Decision*)

Keputusan pendanaan ini menyangkut beberapa hal. Pertama, keputusan mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal sendiri. Kedua, penetapan perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur modal yang optimum. Struktur modal optimum merupakan perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan biaya modal rata-rata minimal.

3. Keputusan Pengelolaan Aset (*Assets Management Decision*)

Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka aset-aset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Pengelolaan dana yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan aset menjadi tanggungjawab manajer keuangan. Tanggungjawab tersebut menuntut manajer keuangan

untuk lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap.

Pada perbankan, manajer keuangan sangat dibutuhkan untuk mampu mengelola keuangan dengan baik agar dana yang diperoleh dari bank dapat dialokasikan dan diinvestasikan untuk kegiatan perbankan yang dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh perusahaan maupun perbankan tidak terlepas dari peran manajer keuangan dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan maupun perbankan.

2.1.2 Bank

Peranan perbankan sangat penting dan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara, karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat dijadikan ukuran negara tersebut maju atau tidak. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam suatu negara.

Menurut Kasmir (2011:2) bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Howard D. Crose dan George J. Hemple dalam Veithzal Rivai Dkk, (2013:1) bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia

dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana, menyalurkan dana ke masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank lainnya.

2.1.2.1 Perbankan

Perbankan ini berbicara tentang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pengertian perbankan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

2.1.2.2 Manajemen Perbankan

Manajemen perbankan merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu lembaga perbankan dengan mempergunakan ilmu dan seni untuk mengelola organisasinya dengan melibatkan berbagai pihak, baik pihak internal dan eksternal yang dilakukan guna mencapai tujuan organisasi (Fahmi, 2014).

Fungsi manajemen perbankan (Fahmi, 2014):

1. Menyusun rencana usaha (baik jangka pendek maupun jangka panjang)

termasuk menetapkan target/sasaran usaha yang ingin dicapai.

2. Menyusun struktur organisasi berdasarkan bidang usaha/jasa maupun volume kegiatan.
3. Menggerakkan/mendayagunakan segenap sumber daya bank terutama sumber daya manusia dan dana yang dikelola.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas bank.

Pada dasarnya fungsi manajemen bank tidak jauh berbeda dengan perusahaan industri, perdagangan maupun perusahaan non bank.

2.1.2.3 Jenis-jenis Bank

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 membagi bank menjadi dua jenis, yaitu:

1. Bank Umum.

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan menurut Kasmir (2011:33), menerangkan bahwa bank dibedakan menjadi beberapa jenis bank, yaitu:

1. Dilihat dari segi kepemilikannya, bank terdiri dari:

1. Bank milik pemerintah

Menurut akta pendirian bahwa modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Bank milik pemerintah antara lain Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri. Adapun bank-bank milik pemerintah daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berada di tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi, contoh BPD antara lain BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur.

2. Bank milik swasta nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon.

3. Bank milik koperasi

Bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).

4. Bank milik asing

Bank cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri, contoh bank milik asing antara lain Bank of America, Bangkok

Bank, City Bank.

5. Bank milik campuran.

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

2. Dilihat dari segi status, bank terdiri dari:

1. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya *transfer* keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

3. Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank terdiri dari:

1. Bank berdasarkan prinsip konvensional

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan berupa giro, tabungan, deposito. Begitu pula untuk produk pinjaman (kredit) ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga (*spread based*).

- b. Untuk jasa-jasa pihak bank menggunakan atau menetapkan biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu (*fee based*).

2. Bank berdasarkan prinsip syariah

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- e. Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pada bank syariah, kedudukan bank adalah sebagai pemodal (investor).

Sedangkan nasabahnya bertindak sebagai Mitra Pemakai Modal. Sedangkan dalam bank umum, hubungan antara bank dan nasabah adalah sebagai kreditur (menyimpan) dan debitur (meminjam) saja.

2.1.3 Kepemilikan Institusi Domestik

Kepemilikan institusi domestik merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan institusi lainnya). Kepemilikan institusi merupakan pemegang saham terbesar sehingga merupakan sarana untuk memonitor manajemen

(Fathimiyah *et al*, 2012).

Menurut Saputro (2014) kepemilikan institusi domestik adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun dan institusi lainnya.

Jadi dengan kata lain kepemilikan institusi domestik merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiunan atau perusahaan lain yang diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun.

Menurut Saputro (2014), variabel kepemilikan institusi domestik diukur dengan:

Jumlah persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi domestik pada akhir tahun, secara sistematis kepemilikan institusi domestik dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah saham institusi domestik}}{\text{total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan institusi domestik umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi domestik maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan, dengan demikian proporsi kepemilikan institusi domestik bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen (Laila, 2011 dalam Wardani, 2014).

2.1.4 Kepemilikan Publik

Kepemilikan institusi publik merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar. Tujuan perusahaan yaitu meningkatkan kinerja perusahaan maka diperlukan pendanaan yang diperoleh baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Sumber pendanaan eksternal diperoleh dari saham masyarakat (publik).

Kepemilikan institusi publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar (Istiqomah, 2010).

Menurut Anisa (2012) menyatakan bahwa:

“Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat. Tingginya tingkat kepemilikan publik akan dapat memberikan banyak informasi mengenai risk management disclosure yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham.”

Menurut Eka (2011) mendefinisikan kepemilikan publik adalah:

“Proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat terhadap saham perusahaan di Indonesia. Publik sendiri adalah individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham dibawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.”

Maka dapat ditarik kesimpulan dari definisi di atas adalah kepemilikan publik merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat yang dihitung dalam persentase.

Jumlah persentase saham yang dimiliki oleh pihak publik pada akhir tahun secara sistematis dapat dihitung sebagai berikut (Istiqomah,2010):

$$KP = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki publik}}{\text{total saham beredar}} \times 100\%$$

2.1.5 *Profitabilitas*

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba dengan menggunakan modal yang cukup tersedia. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba merupakan indikator prestasi atau kinerja perusahaan yang besarnya tampak di laporan keuangan, tepatnya laba rugi.

Menurut Kasmir (2015: 45) laba adalah selisih dari jumlah pendapatan dan biaya, dengan hasil jumlah pendapatan perusahaan lebih besar dari jumlah biaya.

Menurut Yayah Pudir Shatu (2016: 68) laba adalah kenaikan modal aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi oleh pemiliknya.

Menurut Kasmir (2015: 303) dalam praktiknya, laba terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Laba kotor (*gross profit*); dan
2. Laba bersih (*net profit*).

Laba kotor artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh. Sementara itu, laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak.

Profitabilitas suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam menentukan pendanaannya. Menurut Kasmir (2015: 196),

profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Menurut Agus Sartono (2012: 122), *profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis *profitabilitas* ini, misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.

Menurut Reeve, *et al* yang dialihbahasakan oleh Damayanti Dian (2012: 331), rasio *profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Kemampuan dalam menghasilkan laba tergantung pada efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasinya dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, analisis *profitabilitas* menitikberatkan terutama pada hubungan antara hasil kegiatan operasi seperti yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan sumber daya yang tersedia bagi perusahaan seperti yang dilaporkan dalam neraca.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *profitabilitas* merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva dan modal yang dimilikinya.

2.1.5.1 Tujuan dan Manfaat *Profitabilitas*

Menurut Kasmir (2015: 197) rasio *profitabilitas* memiliki tujuan dan

manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan bagi perusahaan. Berikut tujuan dari rasio *profitabilitas* bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk;

1. Untuk mengetahui tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Penggunaan rasio *profitabilitas* dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama

laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.

2.1.5.2 Pengukuran *Profitabilitas*

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan. Untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio *profitabilitas* mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis *profitabilitas*, misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. Terdapat banyak ukuran *profitabilitas*, masing-masing pengembalian perusahaan dihubungkan terhadap penjualan, aktiva modal, atau nilai saham.

Menurut Kasmir (2015: 199) dalam praktiknya, jenis-jenis rasio *profitabilitas* yang dapat digunakan adalah:

1. *Profit Margin on Sales*

Profit margin on sales atau *ratio profit margin* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini dikenal juga dengan nama profit margin. Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu:

Untuk margin laba kotor dengan rumus:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Sales}}$$

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.

Untuk margin laba bersih dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.

1. *Return On Assets (ROA)*

ROA Sering juga disebut dengan *Return On Investment (ROI)*, Merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Secara sistematis ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total assets}}$$

2. *Return On Equity (ROE)*

ROE atau *rentabilitas* modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan

efisiensi penggunaan modal sendiri. Secara sistematis ROE dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

3. Laba Per Lembar Saham

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan pengertian lain bahwa tingkat pengembalian tinggi. Rumus untuk mencari Laba Per Lembar Saham dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Laba Per Lembar Saham} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa Yang Beredar}}$$

2.1.6 *Leverage*

Istilah *leverage* biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan, dengan memperbesar tingkat *leverage* maka hal ini berarti bahwa tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dari *return* yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut juga akan

memperoleh jumlah *return* yang akan diperoleh. Tingkat *leverage* bisa saja berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya atau dari satu periode ke periode berikutnya. Tetapi yang jelas, semakin tinggi tingkat *leverage* akan semakin tinggi risiko yang dihadapi serta semakin besar tingkat *return* atau penghasilan yang diharapkan. Sudana (2011:20) berpendapat bahwa *leverage* adalah mengukur berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya sehingga lebih menyeluruh.

Irham Fahmi (2013:127) mendefinisikan rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

“Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut”.

Menurut Kasmir (2012:151) rasio *leverage* yaitu:

“Rasio *solvabilitas* atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya yang membandingkan antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang.

2.1.6.1 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Terdapat beberapa tujuan dan manfaat rasio *solvabilitas* bagi pihak perusahaan dan pihak di luar perusahaan. Menurut Kasmir (2012:153-154), berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *solvabilitas*, yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

Sementara itu, manfaat rasio *solvabilitas* atau *leverage ratio* adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai hutang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh

terhadap pengelolaan aktiva.

6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

Leverage memberi arti adanya peluang yang tersedia untuk mendapatkan manfaat dari struktur modal perusahaan, dengan memperhitungkan tingkat biaya modal sumber *equity* dan tingkat biaya modal sumber *debt*, struktur modal perusahaan dapat diatur sedemikian rupa, sehingga para pemegang saham dapat menarik manfaat yang optimum dari perusahaan tersebut.

2.1.6.2 Jenis-jenis dan Pengukuran Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2012:155-163) terdapat beberapa jenis rasio *solvabilitas* atau *leverage ratio* yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yakni sebagai berikut:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak

mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasio rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri sejenis.

Rumus untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut (Kasmir, 2012:156):

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan, dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut (Kasmir, 2012:157):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa

bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Rumus untuk mencari *long term debt to equity ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri (Kasmir, 2012:159), yaitu:

$$LTDtER = \frac{\text{Total Hutang long term debt}}{\text{Ekuiti}}$$

4. *Time Interest Earned*

Menurut J.Fred Weston dalam Kasmir (2012:160) *time interest earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C.Van Horne (2012) juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membiayai bunga, sama seperti *average ratio*.

Jumlah kali perolehan bunga atau *time interest earned* merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga dalam jangka panjang maka akan menghilangkan kepercayaan dari para kreditor. Bahkan ketidakmampuan menutup biaya tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan adanya tuntutan hukum dari kreditor, lalu lebih dari itu, kemungkinan perusahaan menuju ke arah pailit semakin besar.

Cara mengukur rasio ini, digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan.

Rumus untuk mencari times interest earned dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut (Kasmir, 2012:160):

$$Time\ Interest\ Earned = \frac{EBIT}{Biaya\ Bunga\ (interest)}$$

atau

$$Time\ Interest\ Earned = \frac{EBIT + Biaya\ Bunga}{Biaya\ Bunga\ (interest)}$$

5. Fixed Charge Coverage (FCC)

Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang mempunyai *times interest earned ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

Rumus untuk mencari *fixed charge coverage (FCC)* adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012:162):

$$Fixed\ Charge\ Coverage = \frac{EBIT + Kewajiban\ Bunga + Kewajiban\ sewa/lease}{Biaya\ bunga + Kewajiban\ sewa/lease}$$

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur bagi suatu perusahaan untuk menentukan kapasitas perusahaan yang dimilikinya, apakah termasuk perusahaan

besar atau kecil.

Menurut Kieso (2011:192) pengertian ukuran perusahaan, yaitu:

“Assets is a resource controlled by the entity as a result of past event and from which future economic benefits are expected to flow to the entity”.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa aktiva adalah sumber daya dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan akan mendapat manfaat ekonomi masa depan untuk perusahaan.

Menurut Hartono (2008:254) pengertian ukuran perusahaan adalah:

“Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”.

Menurut Husnan (2007:45) ukuran perusahaan adalah:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain: total aktiva *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain.”

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan ukuran dari besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari berbagai skala dan dapat diukur berdasarkan pada total aktiva perusahaan.

2.1.7.1 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.46/M-DAG/PER/9/2009 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan, pasal 3 mengelompokan ukuran perusahaan atas:

Tabel 2.1**Ukuran perusahaan Menurut Menteri Perdagangan RI**

Kategori	Nilai Aset (tanpa nilai tanah dan bangunan)
Perusahaan kecil	Rp.50.000.000-Rp.500.000.000
Perusahaan menengah	Rp.500.000.000-Rp.10.000.000.000
Perusahaan besar	>Rp.10.000.000.000

Keputusan ketua Bapepam No.Kep 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus miliar rupiah, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang memiliki total aktiva di atas seratus milyar rupiah.

2.1.7.2 Jenis-jenis Perusahaan

Sukirno (2011:190) menjelaskan bahwa organisasi perusahaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk organisasi yang pokok, yaitu:

1. Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh 1 orang sehingga pemiliknya memiliki kebebasan yang tidak terbatas.

2. Firma

Firma merupakan organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka sepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Modal perusahaan berasal dari para anggotanya, ada kalanya mereka juga meminjam modal dari lembaga-lembaga lain.

3. Perseroan terbatas

Perusahaan-perusahaan besar kebanyakan berbentuk perseroan terbatas.

Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham.

Ketiga bentuk organisasi/perusahaan tersebut merupakan badan usaha swasta yang artinya didirikan oleh orang atau badan swasta. Bentuk organisasi/perusahaan tersebut bergerak pada kegiatan usaha yang berbeda-beda, sehingga bentuk perusahaan itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kategori.

2.1.7.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan sering digunakan untuk menentukan tingkat suatu perusahaan. Perusahaan memiliki total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar yang berbeda-beda. Ketiga hal tersebut seringkali digunakan untuk mengidentifikasi ukuran suatu perusahaan.

Menurut Prasetyantoko (2008:257):

“Aset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar aset biasanya perusahaan tersebut semakin besar”.

Ukuran perusahaan dihitung menggunakan Lagaritma natural dari total asset. Hal ini dikarenakan besarnya total aktiva masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim, untuk menghindari data yang tidak normal tersebut maka total asset perlu di logaritman. Menurut Husnan (2007:45) ukuran perusahaan diukur sebagai logaritma dari total aktiva.

2.1.8 *Risk Management Disclosure*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum mendefinisikan risiko sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 25 Nomor 11/25/PBI/2009, risiko perusahaan perbankan dikelompokkan menjadi delapan, yaitu:

- a. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.
- b. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.
- c. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- d. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan

aspek yuridis.

- g. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
- h. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Semua risiko ini memiliki penyebab dan solusi yang berbeda pula. Hal yang terpenting adalah manajemen pengelolaan risiko dari bank itu sendiri, ketika pengelolaan risikonya berjalan dengan baik, maka bank tersebut dapat bertahan. Namun ketika manajemen risiko yang diambil tidak terkelola dengan baik, bisa menyebabkan sebuah bank akhirnya mengalami sebuah kebangkrutan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha perbankan. Pada Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Pengungkapan manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai pengungkapan informasi mengenai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh

kegiatan usaha perbankan. Pengungkapan ini dapat dituangkan ke dalam laporan tahunan (*annual report*) yang dapat digunakan oleh *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru bank, yang selanjutnya diuraikan pada Ayat 2, kebijakan dan prosedur yang dimaksud setidaknya harus mencakup:

- a. Sistem dan prosedur (*standard operating procedures*) dan kewenangan dalam pengelolaan produk atau aktivitas baru.
- b. Identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru baik yang terkait dengan bank maupun nasabah.
- c. Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk atau aktivitas baru.
- d. Sistem informasi akuntansi untuk produk atau aktivitas baru.
- e. Analisa aspek hukum untuk produk atau aktifitas baru.
- f. Transparansi informasi kepada nasabah.

Risk management disclosure dapat diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan atas bagaimana perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan di masa mendatang. *Risk management disclosure* berpotensi memiliki manfaat untuk para analis, investor, dan *stakeholders* (Amran *et al.*, 2009).

Berdasarkan pengertian diatas, *risk management disclosure* dapat diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan atas bagaimana perusahaan dalam mengendalikan risiko di masa mendatang. *Risk management disclosure* berpotensi memiliki manfaat untuk para analis, investor dan *stakeholder*.

2.1.9 Peneliti Terdahulu

Terdapat peneliti yang melakukan penelitian berkaitan dengan *Risk Management Disclosure*. Beberapa referensi ini digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu mengenai *Risk Management Disclosure* dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Taures (2011)	Analisis Hubungan antara Karakteristik Perusahaan dengan Pengungkapan Risiko (Studi empiris pada Laporan Tahunan Perusahaan-Perusahaan Non-keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009)	Diversifikasi produk, diversifikasi geografis, tingkat <i>leverage</i> , dan tingkat profitabilitas tidak berhubungan signifikan dengan luas pengungkapan risiko Ukuran perusahaan dan jenis industri memiliki hubungan signifikan positif	Variabel dependen: <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Variabel independen: <i>risk management disclosure</i>	Variabel dependen: Jenis Perusahaan, diversifikasi produk, diversifikasi geografis Perusahaan yang diteliti
Anisa (2012)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen	Tingkat <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan berhubungan signifikan dengan	Variabel dependen: <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan	Variabel dependen: Jenis Industri Perusahaan

	Risiko (Studi Empiris pada Laporan Tahunan Perusahaan-Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010)	pengungkapan risiko, sedangkan jenis industri, tingkat profitabilitas, dan struktur kepemilikan tidak berhubungan signifikan.	Profitabilitas Variabel independen: <i>risk management closure</i>	yang diteliti
Hassan (2009)	<i>UAE Corporation-Specific Characteristic and Level of Risk Disclosure</i>	Ukuran perusahaan dan cadangan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan, sedangkan Tingkat risiko dan jenis industri berpengaruh secara signifikan.	Variabel dependen: Ukuran perusahaan, Variabel independen: <i>risk management closure</i>	Variabel dependen: Tingkat risiko, Tipe industri, Cadangan perusahaan (<i>corporate reserve</i>)
Khlif and Souissi (2010)	<i>The Determinants of Corporate Disclosure: A Meta-Analysis</i>	Dari ketujuh variabel independen, hanya ukuran (tipe) auditor yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan perusahaan. Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas, <i>analyst following</i> , <i>multy-nationality</i> , dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan.	Variabel dependen: Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> , Struktur kepemilikan Variabel independen: <i>risk management closure</i>	Variabel dependen: <i>Analyst following</i> , <i>Multy-nationality</i> ,
Saputro (2014)	Pengaruh Struktur Kepemilikan,	Baik secara parsial maupun simultan struktur	Variabel dependen: struktur	Perusahaan yang diteliti

	<i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Resiko	kepemilikan, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen resiko	kepemilika, <i>leverage</i> Ukuran Perusahaan Variabel idependen: <i>Risk managemen t disclosure</i>	Waktu penelitian
Ulfiana Melani Muh Al amin (2016)	Pengaruh kepemilikan manajemen, jenis industri, profitablitas, dan umur perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada industri perbankan dan manufaktur tahun 2010-2014	Kepemilikan manajemen, jenis industri, profitabilitas dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko namun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko	Variabel dependen: Profitabilitas Variabel idependen: <i>Risk managemen t disclosure</i>	Variabel dependen: Kepemilikan manajemen, jenis industri, umur perusahaan Periode penelitian Objek penelitian
Ananda (2013)	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2011)	Kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan manajemen risiko sedangkan kepemilikan publik dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko	Variabel dependen: Struktur kepemilikan (kepemilika n institusi domestik, kepemilikan publik) Variabel idependen: <i>Risk managemen t disclosure</i>	Variabel dependen: kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, dewan komisaris Periode penelitian

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis menyajikan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu dengan menggunakan variabel yang akan diteliti yaitu Kepemilikan Institusi Domestik, Kepemilikan Publik, *Profitabilitas*, *Leverage*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel bebas. Sedangkan sebagai variabel terikat pada penelitian ini adalah *Risk Management Disclosure*. Penelitian ini menggunakan periode penelitian 5 tahun dimulai pada tahun 2011-2015 per triwulan dan objek penelitiannya pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terfokus pada perbankan swasta nasional devisa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya perusahaan yang ada di Indonesia, terutama perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib memberikan informasi yang lengkap mengenai kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*). Pernyataan tersebut didukung oleh Riski (2013) yang menyatakan bahwa laporan tahunan merupakan dokumen wajib yang harus disampaikan oleh perusahaan setiap tahunnya. *Disclosure* memberikan implikasi bahwa keterbukaan merupakan basis kepercayaan publik terhadap manajemen di dalam sistem korporasi. Informasi yang disajikan di dalam laporan tahunan perusahaan harus mudah dapat dipahami, dipercaya, relevan dan transparan, karena informasi yang memadai merupakan dasar dalam pengambilan keputusan yang dilakukan bagi investor, kreditor, dan pengguna informasi lainnya dalam melakukan investasi sehingga diperlukan pengungkapan (*disclosure*) yang memadai.

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusi Domestik terhadap *Risk Management*

Disclosure

Kepemilikan institusi domestik merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga dalam negeri (pemerintah, perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan institusi domestik lainnya). Kepemilikan domestik disini bertindak sebagai prinsipal mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *oportunistic* atau mementingkan diri sendiri (Cornet *et al.*, 2006). Perusahaan akan berjalan dengan baik karena kepemilikan institusi domestik akan selalu memonitoring segala aktivitas perusahaan, sehingga manajemen akan memaksimalkan kinerjanya, hal ini juga dapat mengurangi biaya agensi.

Kepemilikan institusi domestik merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain) (Anggraini, 2011 dalam Fathimiyah dkk, 2012).

Prayoga dan Luciana (2013) yang berjudul pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko, menunjukkan bahwa kepemilikan institusi domestik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko karena semakin besar kepemilikan institusi domestik, maka pengawasan yang diterima perusahaan semakin besar pula.

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap *Risk Management Disclosure*

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat atau yang dimiliki oleh pihak luar (Ruwita, 2012). Tingginya tingkat kepemilikan publik akan dapat memberikan banyak informasi mengenai *risk management disclosure* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham (Anisa, 2012). Ruwita (2012), menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh yang signifikan terhadap *risk management disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik, maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi mengenai risiko yang dihadapi perusahaan.

Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap sebagai suara masyarakat. Adanya konsentrasi kepemilikan publik menimbulkan pengaruh pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang pada awalnya berjalan sesuai keinginan manajemen menjadi memiliki keterbatasan (Puspitasari, 2009). Semakin besar porsi saham yang dimiliki publik, maka akan semakin besar tekanan yang diterima perusahaan untuk menyediakan informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya yang di dalamnya terdapat pula pengungkapan tentang manajemen risiko (Istiqomah, 2010). Ruwita (2012), menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh yang signifikan terhadap *risk management disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik, maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi mengenai risiko yang dihadapi perusahaan.

2.2.3 Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Risk Management Disclosure*

Tingkat *Profitabilitas* merupakan indikator keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba dengan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aset dan modal. Tingginya tingkat *profitabilitas* membuat manajer lebih berani melakukan praktik *risk management disclosure* untuk memperlihatkan kemampuan manajer dalam mengumpulkan dan mengelola informasi, sehingga dalam menyajikan *risk management disclosure* menjadi lebih baik (Taures, 2013).

Purwandri dan purwanto (2012), menunjukkan bahwa tingkat *profitabilitas* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan perusahaan.

Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki *profitabilitas* yang semakin kecil, maka akan semakin sempit kemampuan manajer dalam melakukan *risk management disclosure*.

Perusahaan yang memiliki *profitabilitas* yang tinggi pasti akan melakukan *risk management disclosure* secara lebih luas lagi. Hal ini dilandasi bahwa dengan *profitabilitas* yang tinggi. Pihak manajemen akan dapat menyakinkan para investor bahwa perusahaan dalam menghadapi persaingan sangat kuat sekali.

Purwandri dan Purwanto (2012), menunjukkan bahwa tingkat *profitabilitas* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki *profitabilitas* yang semakin kecil, maka akan semakin sempit kemampuan manajer dalam melakukan *risk management disclosure*.

2.2.4 Pengaruh *Leverage* terhadap *Risk Management Disclosure*

Menurut Purwandri (2012), perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi, akan menggambarkan besarnya risiko yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar hutang, sehingga pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan akan semakin terbatas. Disisi lain semakin rendahnya tingkat *leverage*, maka akan menunjukan kecil risiko yang dihadapi perusahaan, sehingga pengungkapan risiko akan luas.

Penelitian Anisa (2012), menunjukkan bahwa tingkat *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap *risk management disclosure*. Tingkat *leverage* yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah hutang yang lebih besar, sehingga mengakibatkan praktik *risk management disclosure* mengalami kesulitan. Salah satu faktor penting dalam unsur pendanaan adalah hutang (*leverage*). *Solvabilitas (leverage)* digambarkan untuk melihat sejauh mana *asset* perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri (Weston dan Copeland, 1992 dalam Saputro, 2014).

Salah satu faktor penting dalam unsur pendanaan adalah hutang (*leverage*). *Solvabilitas (leverage)* digambarkan untuk melihat sejauh mana *asset* perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri (Weston dan Copeland, 1992 dalam Saputro, 2014).

Menurut Purwandri (2012), perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi, akan menggambarkan besarnya risiko yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar hutang, sehingga pengungkapan laporan

keuangan yang dilakukan akan semakin terbatas.

2.2.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Risk Management Disclosure*

Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar (Sudarmadji, 2007). Semakin besar perusahaan maka semakin banyak informasi yang akan diungkapkannya. Serta semakin detail pula hal-hal yang akan diungkapkan karena perusahaan besar dianggap mampu untuk menyediakan informasi tersebut. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total rata-rata penjualan bersih dari tahun yang bersangkutan sampai dengan beberapa tahun kedepannya. Sedangkan menurut Amran (2009) semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan itu memiliki banyak kepentingan dalam memajukan perusahaan di masa depan sehingga membuat perusahaan semakin luas dalam pengungkapan informasi perusahaan dalam *annual report* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham.

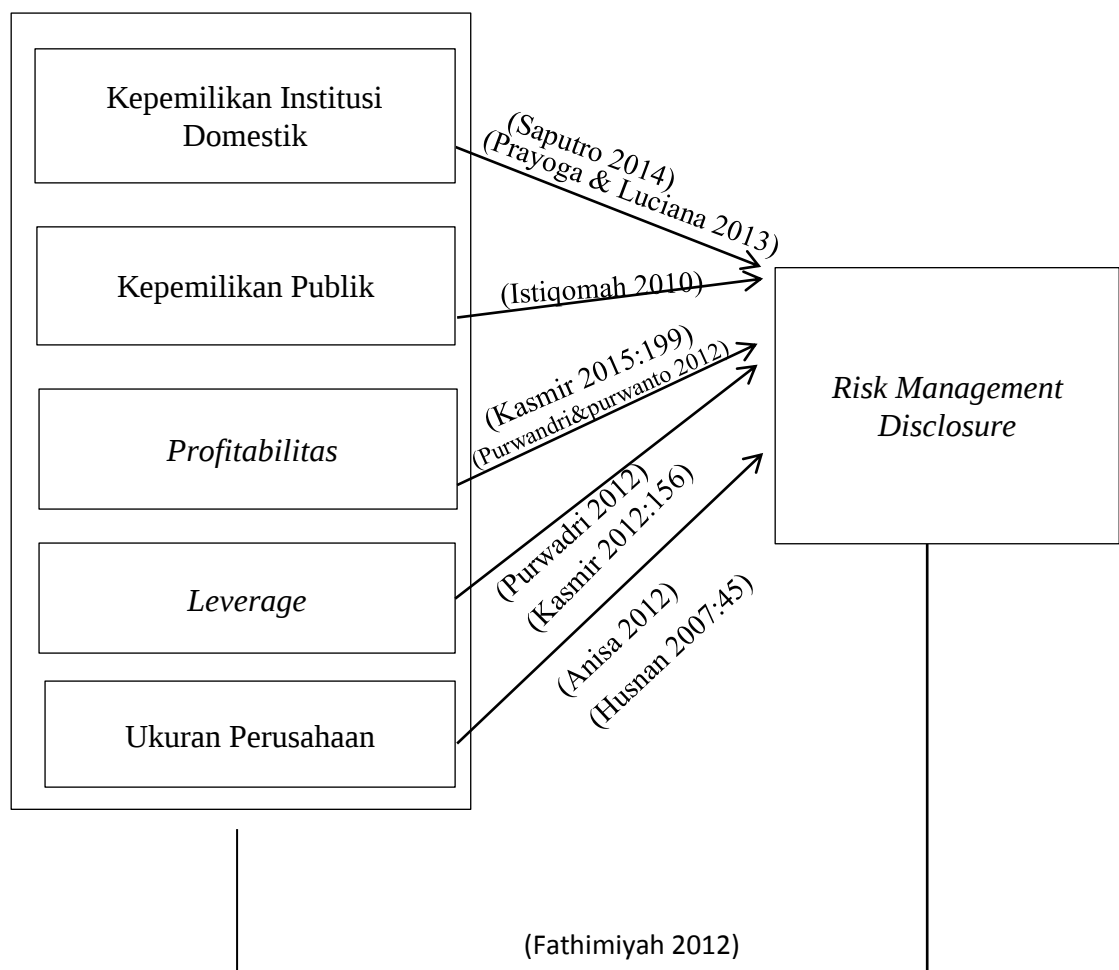
Penelitian Anisa (2012), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko. Perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki kemampuan dalam merekrut karyawan yang ahli, karena adanya tuntutan dari investor dan analisis, sehingga membuat manajer perusahaan memiliki kemampuan yang besar dalam melakukan praktik *risk management disclosure*.

2.2.6. Pengaruh Kepemilikan Intitusi Domestik, Kepemilikan Publik, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Risk Management Disclosure*

Pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan

oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* menyebutkan bahwa perlunya perusahaan untuk mengungkapkan informasi salah satunya adalah informasi manajemen risiko. Pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi kondisi *risk management disclosure* perusahaan cukup banyak, menurut Fathimiyah (2012) struktur kepemilikan yaitu kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik secara simultan dapat mempengaruhi *risk management disclosure*.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan beberapa hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

- H1 :Terdapat pengaruh kepemilikan institusi domestik terhadap *risk management disclosure*.
- H2 :Terdapat pengaruh kepemilikan publik terhadap *risk management disclosure*.
- H3 :Terdapat pengaruh *profitabilitas* terhadap *risk management disclosure*.
- H4 :Terdapat pengaruh *leverage* terhadap *risk management disclosure*.
- H5 :Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *risk managemet disclosure*.
- H6 :Terdapat pengaruh kepemilikan institusi domestik, kepemilikan publik, *profitabilitas*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *risk management disclosure*.